

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	3
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Warta Kota

Pemprov DKI Ajukan Raperda Cadangan Beras

► Minta Sebanyak 5.000 Ton

Palmerah, Warta Kota

Pemerintah DKI Jakarta mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) untuk cadangan beras pemerintah daerah (CBPD) di Ibu Kota sebanyak 5.000 ton.

Jumlah ini merupakan hasil kajian Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta dari jumlah penduduk Jakarta yang mencapai 10,7 juta jiwa, berdasarkan pendataan Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta.

Kepala Dinas KPKP DKI Jakarta Suharini Eliawati mengatakan, pemerintah daerah memang belum memiliki payung hukum soal cadangan beras untuk skala daerah. Saat ini pemerintah masih mengau pada UU Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan.

"Kami harus membuat Perda-nya, dan saat ini sedang kami ajukan (Raperda) ke Bapemperda (Badan Pembentukan Peraturan Daerah) DPRD DKI Jakarta," ujar Suharini pada Rabu (8/2/2023).

Suharini mengungkapkan, pembahasan mengenai Raperda telah terjadwal akan dilakukan pada April 2023 mendatang.

Dia berharap rancangan regulasi ini bisa segera disahkan, sehingga setiap tahun pemerintah daerah dapat mengalokasikan dana untuk cadangan beras guna mengantisipasi hal yang tidak diinginkan.

"Begitu selesai pembahasan, kami punya Perda. Kemudian kami usulkan (pengadaan beras) di anggaran perubahan (anggaran pendapatan dan belana daerah perubahan/APBD-P)," katanya.

Menurut Suharini, nantinya gudang akan diisi oleh 5.000 ton beras sebagai cadangan pemerintah daerah.

Logistik akan didistribusikan kepada masyarakat ketika Jakarta mengalami kondisi

tertentu, mulai dari bencana alam hingga kenaikan harga pangan.

"Kami nggak boleh jaga 5.000 ton terus, kalau nggak dipakai (beras) kan bisa rusak," ucapnya.



Suharini Eliawati

Suharini menjelaskan, cadangan beras bisa dipasok dan disimpan di gudang milik BUMD DKI Jakarta, PT Food Station Tjipinang Jaya atau Perum Badan Urusan Logistik (Bulog).

Nantinya Pemerintah DKI Jakarta akan mengatur mekanisme cadangan beras ini jika regulasi soal CBPD disahkan DPRD DKI Jakarta.

Berdasarkan catatannya, kebutuhan beras di Jakarta mencapai 82.000-84.000 ton dalam sebulan. Adapun stok saat ini di Bulog dan Food Station Tjipinang Jaya mencapai 40.000 ton.

Beras Dioplos

Diberitakan sebelumnya ketika melakukan sidak di Gudang Food Station, Cipinang, Jakarta Timur, pada Jumat (3/2/2023), Direktur Utama Bulog yakni Budi Waseso menemukan total dua pengusaha penjual beras yang melakukan pelanggaran.

Pengusaha tersebut telah melakukan pelanggaran terhadap Cadangan Beras Pemerintah (CBP).

Hasil temuan pelanggaran itu, didapat Budi ketika menyidak tiga pengusaha beras di blok E dan D.

Pelanggaran tersebut berupa pengemasan secara oplos beras berukuran 50 kilogram, dengan beras Bulog menjadi merek lain.

"Dari Bulog beli Rp 8.800, dipindahkan ke karung merk lain dan disahkan menjadi Rp 12.000 per kilogram, itu sudah pelanggaran sesuai aturan penjualan CBP," kata Budi, saat ditemui awak media, pada Jumat (3/2/2023).

(faf)